

MAKALAH RENUNGAN TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA DEWASA INI

*Disampaikan pada Seminar Pekan Pendidikan Nasional BEM FKIP Unlam
Di Aula Rektorat Unlam Lantai I
Sabtu, 19 Agustus 2006*

**OLEH
MOH. FATAH YASIN**

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah upaya yang sengaja untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam melaksanakan pendidikan ini perlu adanya pemilihan yang cermat terhadap suatu pendekatan, apakah berpusat pada guru atau pada siswa (peserta didik), atau yang lain.

Pendekatan yang diambil seyogianya memberikan tempat yang semestinya, yaitu adanya keseimbangan bagi peserta didik baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Keseimbangan kedudukan sebagai objek dan subjek ini perlu dijaga agar tuntunan yang dimaksud dapat merupakan proses dialektik dengan resultante yang positif.

Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik seharusnya diusahakan agar holistik integratif baik dalam artian diri pribadi maupun dalam kaitannya dengan lingkungan. Dengan kata lain, pendidika seyogianya mencegah adanya reduksianisme.

Pendekatan dalam arti pola asuh seyogianya dipilih yang semutakhir mungkin, selain dengan maksud agar peserta didik dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan, juga mampu memiliki kepribadian yang mandiri dan kreatif, dan bila diperlukan mempunyai keikutsertaan yang positif dalam upaya rekonstruksi masyarakat.

Masyarakat yang bernuansa edukatif ialah masyarakat yang berfungsi sebagai ajang yang kondusif bagi pendidikan yang bernuansa demokratis. Dalam masyarakat yang demokratis peserta didik selalu mampu untuk tunduk, beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada secara proporsional dan yang memberi jalan terhadap berkembangnya kemandirian.

Sementara ini perlu diamati adanya hal-hal yang kurang memuaskan dalam perekayasa terhadap masyarakat di masa lampau. Pada saat ini perubahan masyarakat diharapkan datang bukan dari lapisan atas tetapi dari lapisan bawah dan dijiwai oleh semangat egalitarian. Oleh karena itu, perekayasa masyarakat di masa yang akan datang hendaklah berdasarkan atas filsafat kebijakan sosial. Dalam hubungan ini, maka pendidikan akan dapat meningkatkan status kemasyarakatan dari warga negara untuk berpartisipasi semaksimal mungkin dalam rekayasa masyarakat. Melalui pendekatan begini peserta didik diharapkan menjadi terbiasa untuk berpartisipasi dengan aktif dalam rekayasa masyarakat.

Coba kita simak pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato memperingati Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu. Beliau mengatakan “ Bangsa yang maju adalah bangsa yang baik pendidikannya; bangsa yang jelek pendidikannya tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju.”

Ada beberapa pertanyaan yang perlu direnungkan masyarakat terdidik Indonesia terkait dengan pernyataan Presiden tersebut. Apakah pendidikan nasional kita sudah baik? Apakah paradigma pendidikan yang dianut sistem pendidikan nasional kita sudah benar? Bagaimanakah caranya supaya bangsa kita termasuk bangsa yang terdidik dalam waktu dekat? Dan masih banyak pertanyaan besar yang ada di kepala ini.

Marilah kita telaah satu-persatu

DESKRIPSI DATA KEADAAN PENDIDIKAN INDONESIA PADA SAAT INI

Dari 169.000-an SD dan MI di Indonesia hanya delapan sekolah yang masuk standar internasional, dari 32.000-an SMP dan MTs hanya delapan sekolah yang masuk standar internasional, dari 16.000-an SMA dan MA hanya tujuh sekolah yang diakui kualitasnya oleh The International Baccalaureate Organization (2005).

Di tingkat pendidikan tinggi, dari 100 perguruan tinggi terbaik di Asia dan Australia versi Shanghai Jiao Tong University (2005), tak satupun perguruan tinggi yang berasal dari Indonesia.

Berdasarkan data kasar ini, pertanyaan besar pertama di atas bisa kita jawab dengan menundukkan kepala “ Ternyata pendidikan nasional kita belum baik.”

PARADIGMA PENDIDIKAN YANG DIANUT PENDIDIKAN INDONESIA PADA SAAT INI

Seorang ahli pendidikan dari negara luar mengatakan bahwa kunci revitalisasi pendidikan ada pada kurikulum, ada ahli lain dari luar negara kita mengatakan kunci revitalisasi ada pada semua aspek , seperti sarana, fasilitas, kurikulum, dan teknologi.

Paradigma revitalisasi pendidikan yang disampaikan ahli pendidikan dari luar tersebut sebenarnya keliru. Namun, justru paradigma yang keliru inilah yang banyak diterapkan di negara kita. Ahli pendidikan, akademisi, mahasiswa, siswa, masyarakat, komite sekolah, praktisi pendidikan, dewan pendidikan, serta dinas yang terkait dengan masalah pendidikan ini menganggap kalau sarana bagus, fasilitas memadai, kurikulum baik, teknologi menjanjikan, otomatis akan diperoleh hasil pendidikan yang baik.

Kenyataan membuktikan. Di negara kita pada saat ini sedang diluncurkan program pendidikan anak-anak ber-IQ 150 ke atas. Mereka dididik dengan sarana dan fasilitas memadai ,kurikulum bagus, dan sebagainya. Setelah dievaluasi, hasilnya biasa saja.

Kunci revitalisasi pendidikan sebenarnya ada pada guru. Hal ini sudah penulis sampaikan pada seminar memperingati hari ulang tahun PGRI pada saat yang lalu. Ki Hajar Dewantara dengan Tamansiswanya pernah mengajar di tempat yang bocor, dinding miring, meja belajar seadanya, tetapi karena guru-nya baik, hasil pendidikannya pun baik.

Kekeliruan paradigma itu sepertinya terjadi di Indonesia sejak dahulu. Ketika berbicara mutu, orang terlena “mengutak-atik” kurikulum, mempermasalahkan gedung, mempersoalkan buku, menyudutkan manajemen, memperdebatkan ujian, dan lain-lain. Namun, masyarakat kita tidak pernah memperbincangkan guru secara serius. Sejauh mana keberhasilan guru mengajar di depan kelas dan sejauhmana tingkat profesionalismenya hampir tidak pernah disentuh, apalagi nasibnya.

Berdasarkan data Depdiknas banyak guru dan dosen yang tidak layak mengajar, tetapi data ini hanya dijadikan bahan bacaan dan tidak pernah ditindaklanjuti. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Mengamanatkan agar semua guru TK hingga SMA/SMK harus berkualifikasi sarjana (S-1). Standar ini

bagus. Namun benarkah guru yang memiliki kualifikasi akademis lebih tinggi dijamin lebih berhasil mengajar?

Secara implisit Standar Nasional Pendidikan mengatakan bahwa pendidikan kita akan bermutu jika semua guru sudah berkualifikasi sarjana (S-1). Jika harus menunggu seluruh guru berkualifikasi sarjana, setengah abad ke depan pun belum tentu terpenuhi. Berdasarkan data Balitbang Depdiknas (2004) guru SMA yang berkualifikasi sarjana baru 72,75 persen dari seluruh guru yang ada; SMK 64,16; SMP 42,03; SD 8,30; dan TK baru 3,88 persen. Sambil menunggu peningkatan “angka sarjana”, sebaiknya diciptakan sistem untuk mengombinasikan kualifikasi akademis dengan pengalaman mengajar.

Kita boleh berteori mengenai revitalisasi pendidikan nasional, tetapi jika dianalisis, keberhasilan revitalisasi pendidikan nasional amat ditentukan oleh keberhasilan guru (dan dosen) mengajar di depan kelas.

FAKTA-FAKTA YANG MENUNJUKKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA MENUJU KE ARAH YANG BENAR

Memahami Peserta Didik

Peserta didik sebagai anak manusia adalah makhluk yang terkomposisi atas jiwa dan raga yang pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan. Kedua komponen ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan irama-irama yang secara umum terpolakan. Namun setiap individu mempunyai keunikan masing-masing. Pada setiap peserta didik ada potensi untuk berkembang dalam menemukan kemandiriannya. Penemuan ini akan berhasil bergantung pada pengaruh eksternal, seperti pendidikan.

Sebagai makhluk peserta didik pasti mengalami proses untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan diharapkan menjadi wahana bertemunya faktor-faktor endogen dan eksogen secara konvergensi untuk meningkatkan perkembangan anak didik. Upaya-upaya mempertemukan faktor-faktor tersebut perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kelayakan dan keseimbangan antara aspek-aspek teori dan praktik. Dengan kata lain, intervensi pendidik terhadap peserta didik hendaknya dilakukan secara bijak sehingga dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik secara memadai.

Dalam pendidikan nasional kita pemahaman tentang peserta didik ini termaktub dalam (1) Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat , (2) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, (3) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisten pendidikan nasional, (4) PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, dan (5) Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) : Contoh Sebuah Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan

MBS adalah suatu program dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan atas kerjasama antara pemerintah Indonesia- Unesco- Unicef. Dalam pelaksanaannya mempunyai ciri (a) semakin dekatnya sekolah dengan masyarakat sekitar, (b) dipersubur tumbuhnya inovasi dan upaya-upaya peningkatan relevansi pendidikan bagi masyarakat sekitar, (c) ditingkatkannya kepedulian para pelaku pendidikan dalam hal bertanggung jawab langsung terhadap kualitas pendidikan di sekolah dan anak-anak yang diasuhnya, (d) ditingkatkannya partisipasi orang tua , komite sekolah, dan masyarakat sekitar terhadap sekolah, dan (e) ditumbuhkannya kebutuhan pendidikan terhadap sumber daya lokal di sekolah-sekolah.

Sekolah-sekolah pelaksana MBS diharapkan berhasil dalam hal (a) merumuskan program sekolah yang jelas dan dijelaskan kepada orang tua siswa dan masyarakat sekitar, (b) pengelolaan sekolah dalam hal KBM, keuangan, dan upaya pengembangannya diumumkan secara terbuka, (c) rapat rutin sekolah-komite sekolah-tokoh masyarakat sekuran-kurangnya 4 kali dalam satu tahun, (d) peningkatan disiplin waktu kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, dan murid-murid, (e) ada kontrol secara periodik oleh komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat sekitar terhadap kinerja sekolah setiap harinya, (f) diberlakukannya sistem imbalan dan sanksi yang sesuai terhadap kinerja kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah, dan (g) mutu sekolah meningkat yang dapat diukur lewat semakin baiknya nilai siswa, berkurangnya angka putus sekolah dan tinggal kelas, serta prestasi-prestasi akademik lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan tema yang saya terima dari panitia tertulis “Pendidikan tanpa rasa takut”. Dari tema ini saya berfikir apanya yang ditakutkan. Semuanya telah terbuka dan jelas, sebab akuntabilitas pendidikan sudah merupakan hak publik.

Namun menurut hemat saya yang perlu ditakutkan adalah apakah paradigma yang kita anut dalam pendidikan ini telah benar dan bagaimana setelah kita menyelesaikan pendidikan tersebut?

Fakta menunjukkan bahwa proporsi jumlah tenaga penganggur lulusan pendidikan yang lebih tinggi ternyata lebih besar dibandingkan dengan proporsi penganggur dari lulusan pendidikan yang lebih rendah. Dengan kata lain, persentase jumlah penganggur tenaga sarjana lebih besar dibandingkan dengan persentase jumlah penganggur lulusan SMA atau jenjang pendidikan yang lebih rendah.

Marilah dalam memperingati Pekan Pendidikan Nasional ini kita merenung tentang masa depan kita dan apa yang harus kita perbuat untuk hari esok.

Rujukan Bacaan

Muhajir, Noeng H Prof. Dr. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Rake Sarasin

Salim, Emil, Prof. Dr. 1996. *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia

Sindhunata (Eds). 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius

Suryadi, Ace dan Tilaar HAR. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya

Tilaar, HAR. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Tilaar, HAR. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta